

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya suatu negara dapat dilihat dengan kualitas kesejahteraan penduduknya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk pada suatu negara yaitu: tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat pembangunan pada negara tersebut.

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional bagi masyarakat, bukan untuk mengejar keuntungan semata. Sekalipun keuntungan bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota, akan tetapi usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup para anggota dan meningkatkan kemampuan usaha bukan untuk memupuk kekayaan, sehingga pada setiap akhir periode koperasi dapat ditargetkan untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila koperasi menduduki hal yang penting dalam sebuah perkembangan suatu negara disamping faktor-faktor lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 1, koperasi adalah ” badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi lembaga ekonomi rakyat yang berkembang agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Secara umum, koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan yang dikelola bersama-sama untuk mensejahterakan anggotanya. Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *co-operation* yang artinya usaha bersama, yaitu

suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.

Segala aktivitas kinerja yang dilakukan oleh koperasi sudah seharusnya dikelola secara profesional dan didukung oleh semua anggota koperasi dengan cara melakukan evaluasi setiap tahunnya yang ditandai dengan diadakannya rapat anggota. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 26, “rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau”. Adanya evaluasi tersebut, diharapkan koperasi dapat terus mengembangkan usahanya sehingga mampu berkiprah dengan baik dalam rangka memperoleh keuntungan optimal demi memajukan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam memajukan kesejahteraan anggotanya dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satu faktor yang paling utama adalah faktor *financial* (keuangan). Faktor keuangan tersebut sangat penting untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan usaha pada koperasi, karena hal itu maka kinerja keuangan harus dievaluasi. Selain faktor keuangan, tingkat kesehatan pada koperasi juga dapat memperlihatkan kinerja koperasi tersebut dari predikat sangat tidak sehat sampai dengan predikat sehat. Pengevaluasian tingkat kesehatan koperasi dapat diukur dari berbagai rasio keuangan yang dianalisis atas dasar laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan data yang paling penting didalam suatu badan usaha termasuk juga koperasi, yang mana laporan keuangan ini berguna untuk membantu koperasi dalam memperoleh informasi mengenai hasil yang dicapai oleh koperasi.

Perwujudan dari kesungguhan pemerintah dalam mengelola dana pada koperasi adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja merupakan bagian dalam suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan usaha, para anggota dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga tersebut. Oleh karena itu, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang merupakan peraturan tentang pedoman penilaian

kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang adalah koperasi yang mempunyai jenis usaha yaitu di bidang simpan pinjam dan penjualan dan pengadaan barang (jasa konsumen). Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang yang berkedudukan di kantor RRI Stasiun Palembang Jalan Radio No 2 Ilir Timur I Palembang, telah berdiri sejak tahun 1980 dengan anggotanya yang hanya diperuntukkan bagi Pegawai di RRI Palembang.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang perlu melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Tingkat kesehatan koperasi pada KPRI menunjukkan total seluruh rasio pada 2016 sebesar 58,00, tahun 2017 sebesar 60,75 dan tahun 2018 sebesar 63,00. Selama tiga tahun terakhir Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang masuk dalam kriteria “Dalam Pengawasan” karena kurang dari 80,0. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 koperasi dapat dikatakan sehat apabila nilai skornya lebih dari 80,0 Hal ini mencerminkan kurangnya kinerja yang ada pada KPRI dan perlu diperbaiki untuk dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang perlu melakukan analisis tingkat kesehatan pada koperasi, agar dapat mengelola dana dengan baik serta dapat menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja merupakan bagian dalam suatu lembaga usaha.

Penilaian Tingkat Kesehatan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang dihitung berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Pada peraturan tersebut, terdapat aspek-

aspek penilaian yang terdiri dari beberapa rasio keuangan. Rasio keuangan menurut peraturan tersebut yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jatidiri koperasi. Dengan melakukan penilaian tingkat kesehatan ini, diharapkan dapat membantu koperasi dalam mengetahui kelemahan dan juga kekurangan yang ada pada koperasi saat ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana dimasa yang akan datang agar dapat lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan masalah tersebut yang berjudul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan data laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kondisi tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang bila dilihat dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi.

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah agar tidak terjadi penyimpangan dan lebih terarah solusinya serta dapat mencapai tujuan penulisan laporan akhir ini. Untuk itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada analisis aspek penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Replublik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang meliputi: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva

produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jatidiri koperasi.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada diatas, laporan akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta mengevaluasi tingkat kesehatan koperasi bila dilihat dari ketujuh aspek yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri koperasi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam menyusun laporan akhir serta dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi khususnya pada mata kuliah analisa laporan keuangan.

2. Bagi Perusahaan

Memberi masukan dan saran bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang agar dapat memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan KPRI dalam mengevaluasi tingkat kesehatan pada koperasi di masa yang akan datang.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan referensi yang bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya dan sebagai acuan penulisan selanjutnya agar dapat dikembangkan.

## **1.5 Metode Pengumpulan dan Sumber Data**

### **1.5.1 Metode Pengumpulan Data**

Penyusunan laporan akhir ini dibutuhkan data yang akurat, objektif dan dapat mendukung sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan permasalahan

yang ada pada diperusahaan. Kegiatan pengumpulan data guna menganalisis permasalahan yang ada pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang penulis menggunakan beberapa cara.

Menurut Sanusi (2013:105) pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Cara survei

Cara survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Jika pernyataan diajukan dalam bentuk lisan maka namanya wawancara, kalau diajukan secara tertulis disebut kuisisioner. Berkaitan dengan itu, cara survei terbagi menjadi dua bagian, yaitu wawancara (interview) dan kuisisioner.

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon.
- b. Kuisisioner, pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan (kuisisioner) yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu.

2. Cara Observasi

Cara observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun nonperilaku.

3. Cara Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti : laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi. Penyusun tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan metode pengumpulan di atas, teknik yang digunakan oleh penulis dalam penulisan laporan akhir ini adalah dengan cara survei dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objeknya yaitu, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang. Selain itu, penulis menggunakan cara dokumentasi dengan mengumpulkan data-data perusahaan berupa laporan laba rugi dan neraca.

### 1.5.2 Sumber Data

Penyusunan laporan akhir ini penulis membutuhkan data yang mendukung dalam penyelesaian rumusan masalah yang terjadi pada perusahaan. Sumber data berdasarkan cara memperolehnya, menurut Sanusi (2013:104) dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

1. Data Primer  
Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Terkait dengan data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

Berdasarkan sumber sumber data yang di atas, maka penulis menggunakan sumber data primer. Berikut ini data primer yang diperoleh penulis dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang:

1. Sejarah singkat perusahaan.
2. Struktur organisasi perusahaan.
3. Pembagian tugas dan wewenang.
4. Laporan Laba Rugi.
5. Neraca.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya laporan akhir ini terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan materi yang akan dibahas. Tiap bab memiliki hubungan langsung antara satu dengan yang lainnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pelaporan akhir yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Di bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan dan sumber data serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di Bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas. Teori tersebut antara lain:

pengertian koperasi, laporan keuangan dan analisa laporan keuangan, metode dan teknik analisis laporan keuangan, pengertian analisis ratio keuangan, pengertian kesehatan koperasi dan indikator pengukuran tingkat kesehatan koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Replublik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum yang berhubungan dengan perusahaan, aktivitas perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, laporan keuangan koperasi berupa neraca dan laporan laba rugi yang dibandingkan antara tahun 2016, 2017 dan 2018.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Penulis akan menganalisis laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Replublik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. yang meliputi: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jatidiri koperasi.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini penulis mengemukakan kesimpulan sebagai hasil dari analisis yang ada pada bab IV serta memberikan saran-saran yang mungkin dapat membantu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang di masa yang akan datang dalam menjalankan aktivitas usahanya.